

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Provinsi Kalimantan Utara adalah merupakan Gabungan dari inflasi Kota Tarakan, Tanjung Selor, dan Kabupaten Nunukan. Secara bulan ke bulan/*month to month* (m-to-m), Inflasi Kaltara pada Triwulan II Tahun 2015 secara berturut turut pada bulan April tercatat sebesar 0,45 persen, Mei tercatat sebesar 0,06 persen, dan Juni tercatat sebesar 0,07 persen. Secara tahun ke tahun/*year on year*, inflasi Kaltara pada Triwulan II Tahun 2015 secara berturut turut pada bulan April tercatat sebesar 1,3 persen, Mei tercatat sebesar 1,24 persen, dan Juni tercatat sebesar 1,38 persen. Secara *Year to date*/tahun kalender inflasi Kaltara pada Triwulan II Tahun 2015 tercatat sebesar 1,18 persen. Angka Inflasi tersebut tercatat lebih rendah dari sasaran inflasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2015 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2015-2020 yaitu sebesar  $2.5 \pm 1$  persen atau pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen.

10 Komoditas yang paling dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Juni 2015, antara lain: emas perhiasan, ikan bandeng, nasi dengan lauk, kopi bubuk, ikan layang, minyak goreng, sigaret kretek mesin (skm), bahan bakar rumah tangga, sigaret kretek tangan (skt), sigaret putih mesin (spm). Sedangkan 10 komoditas yang paling dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain: tomat, angkutan udara, daging ayam ras, bayam, sawi hijau, cabai rawit, tempe, tahu mentah, kol kubis, kacang panjang.

Sementara itu, komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada Juni 2015, antara lain: angkutan udara, tomat, beras, ikan layang, ikan bandeng, tarif air minum pam, sigaret kretek mesin (skm), sewa rumah, bawang merah, kopi bubuk. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m*, antara lain: cabai rawit, kangkung, bayam, daging ayam ras, sawi hijau, tempe, obat gosok, bensin, buku tulis bergaris, emas perhiasan.

Beberapa risiko kenaikan Inflasi Kalimantan Utara yang perlu diwaspadai pada Triwulan III Tahun 2015 antara lain adanya potensi gangguan cuaca yang dapat mengganggu kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan, terjadinya *shock* kebijakan pemerintah pusat yang di luar kewenangan daerah, dan adanya potensi kenaikan inflasi karena kenaikan tarif Air minum PDAM.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Secara historis dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Inflasi Kalimantan Utara terbagi menjadi dua siklus. Siklus peningkatan inflasi biasanya terjadi pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) yang disebabkan karena meningkatnya permintaan. Sementara siklus deflasi terjadi akibat melimpahnya pasokan barang di pasaran dan adanya kebijakan pemerintah menurunkan harga komoditas *administered price* seperti tiket pesawat dan tarif listrik.

Berdasarkan karakteristiknya, Inflasi kelompok *Administered Price* (AP) selalu berada di atas Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi kelompok *Administered Prices* fluktuatif tergantung siklus dan *shock* kebijakan Pemerintah Pusat. Inflasi kelompok *Core* relatif stabil. Sementara,

inflasi *Volatile Food* (VF) cukup terjaga di level rendah dan relatif stabil.

Berdasarkan identifikasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan pengendalian inflasi Provinsi Kaltara yang perlu menjadi perhatian. Dari sisi keterjangkauan harga terdapat permasalahan pada adanya tingginya disparitas harga komoditas di Kaltara dibandingkan dengan harga komoditas Provinsi lainnya di Indonesia dan banyaknya harga komoditas di pasar yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP).

Dari sisi ketersediaan pasokan rendahnya produksi komoditas lokal masih menjadi penyebab utama tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah dan belum adanya Gudang Bulog yang melayani wilayah Kabupaten Tana Tidung dan Malinau yang menyebabkan tingginya biaya distribusi dan kecukupan pasokan untuk kedua wilayah tersebut.

Dari sisi kelancaran distribusi, keterbatasan infrastruktur masih menjadi permasalahan utama yang menghambat kelancaran pasokan. Selain itu mahal nya biaya bongkar muat barang dan buruh angkut serta merusakkan jalan akibat faktor cuaca menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi komoditas di Kaltara.

Dari sisi komunikasi yang efektif terdapat permasalahan belum sinergi dan efisiennya anggaran pengendalian inflasi daerah serta adanya potensi ekspektasi inflasi meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui implementasi strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif). Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga telah dilaksanakan beberapa upaya antara lain: pada tanggal 3 Juni 2025 telah dilaksanakan sidak pasar dan pemantauan harga bahan pokok menjelang hari raya Idul Adha. Setiap hari kerja telah dilaksanakan verifikasi data bahan pokok pada aplikasi Sistem pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional, dan Sistem Informasi Pengendalian Inflasi dan Harga Terpadu Kalimantan Utara (Siap SIGAPKU). Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang HBKN Idul Adha pada tanggal 4 Juni 2025 di Halaman Masjid Al-Ma'arif Kota Tarakan. Pada tanggal 16 Juni 2025, dalam rangka mengendalikan inflasi ikan telah dilaksanakan kegiatan pasar Ikan Murah di Stadion Datu adil Kota Tarakan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan telah dilakukan beberapa upaya antara lain: 9 April 2025 melaksanakan Panen bersama padi Gogo di lahan kelompok Tani Bintang Kakao Desa Pejalín, Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Tanggal 15 April 2025 telah dilaksanakan koordinasi strategis Optimasi Lahan Tahun 2025. Pada tanggal 30 April-1 Mei 2025 telah dilaksanakan Rakor percepatan realisasi program Luas Tambah Tanam di Tarakan yang dihadiri oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian. Pada tanggal 7 Mei 2025 telah dilaksanakan Rapat koordinasi percepatan Swasembada Beras melalui Optimasi Lahan dan Cetak Sawah di Ruang Pertemuan Gubernur Kalimantan Utara yang dihadiri oleh Menteri Pertanian, Gubernur Kalimantan Utara, dan Bupati/Walikota se Kaltara. Pada tanggal 21 Mei 2025 telah dilaksanakan Rapat review Survey Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan di Kabupaten Malinau. Pada tanggal 27 Mei 2025 telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Optimasi Lahan dan Seminar SID Cetak Sawah di Tanjung Selor. Tanggal 2 Juni 2025 telah

dilaksanakan Rapat koordinasi swasembada pangan dan pembentukan Koperasi Merah Putih Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi telah dilakukan beberapa upaya antara lain: pada tanggal 6 April 2025 telah dilaksanakan prosesi pelepasan layanan angkutan perairan (rede transport) gratis Kapal KM Gandha nusantara 5 rute bulungan Tarakan di Dermaga Ancam Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan oleh Gubernur Kaltara. Pada tanggal 29 April 2025 telah dilakukan kunjungan lapangan ke ruas jalan poros Tanjung Selor tanah Kuning yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kaltara.

Dalam rangka komunikasi yang efektif telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain: Telah dilaksanakan Rapat Rutin Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri setiap hari senin. Pada tanggal 4 Juni 2025 telah melaksanakan rapat teknis pengendalian inflasi daerah. Pada tanggal 30 Juni 2025 telah dilaksanakan Rapat penguatan tupoksi petugas data pengendalian inflasi daerah di Tanjung Selor.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka memastikan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang tepat sasaran perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah Provinsi Kalimantan Utara Triwulan II tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Kerja sama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi belum dilaksanakan secara optimal.
2. Operasi pasar dan GPM belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan anggaran dan pelaksanaannya belum berfokus pada komoditas penyumbang inflasi serta belum dilaksanakan pada titik wilayah yang angka inflasinya tinggi.
3. Monitoring harga harian sudah dilaksanakan oleh Disperindagkop melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Panel harga Pangan serta Bank Indonesia melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dengan baik. Data pemantauan harga tersebut perlu dikolaborasikan dan dilakukan analisis lebih lanjut agar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi lebih tepat sasaran.
4. Pelaksanaan sidak telah dilaksanakan dengan baik namun perlu lebih diintensifkan ke 5 Kabupaten/Kota di altara. Sidak perlu diintensifkan di seluruh wilayah dan difokuskan pada beberapa distributor yang menjual barang jauh di atas HET sehingga diharapkan dapat mencegah kelangkaan dan menindak apabila terjadinya penyimpangan.
5. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sudah dilakukan, tetapi belum signifikan meningkatkan pasokan komoditas pangan daerah sehingga pasokan masih sangat bergantung pada daerah lain. vi) Peningkatan Cadangan Pangan pemerintah Daerah telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan bekerja sama dengan Perum BULOG utamanya terhadap komoditas beras. Perlu juga didorong cadangan pangan selain beras untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.
6. Belum adanya Gudang Perum Bulog di wilayah KTT dan Malinau menyebabkan tingginya harga komoditas di kedua wilayah tersebut sehingga perlu didorong adanya diskusi lebih lanjut antara Provinsi kaltara, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan Perum BULOG Kantor Cabang Bulungan untuk merealisasikan dibangunnya gudang untuk mengefisienkan distribusi pasokan. viii) Perlu adanya dorongan terhadap PT Pelindo

(Persero) agar segera merealisasikan pengerukan dan pembangunan dermaga pelabuhan Malundung. Selain itu, perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan pelabuhan yang dikelola oleh Provinsi untuk perbaikan jalur distribusi barang.

7. Belum dilakukan pengaturan tarif bongkar muat, sehingga perlu dilakukan kajian penurunan tarif bongkar muat barang dan biaya bongkar muat barang sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
  8. Telah dilaksanakan perbaikan jalan pada titik-titik yang rawan longsor oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara dan Besar Balai Jalan Nasional Kalimantan Timur. Selain itu, perlu adanya peningkatan dan perbaikan jalan utamanya pada jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
  9. Telah dilaksanakan koordinasi secara rutin melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Mingguan TPID se-Indonesia, dan Rapat Teknis TPID Provinsi Kalimantan Utara.
  10. Sudah dilaksanakan sosialisasi belanja bijak oleh instansi terkait, tetapi ke depan perlu dilakukan sosialisasi secara masif melalui media informasi yang dimiliki oleh masing-masing instansi.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

No.	Strategi	Rekomendasi
		Perlu dilakukan kerja sama antar daerah
		Perlu dilakukan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah berfokus pada komoditas yang sedang mengalami lonjakan kenaikan harga di atas HET.
1.	Keterjangkauan harga	Penguatan monitoring harga harian komoditas pangan strategis.
		Pemberian subsidi pada komoditas yang sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penguatan pengawasan agar subsidi tepat sasaran bagi masyarakat.
		Mendorong peran BUMN dan BUMD dalam stabilisasi harga.
		Meningkatkan produksi beras lokal melalui cetak sawah dan peningkatan areal tanam.
2.	Ketersediaan Pasokan	Pendataan sawah yang belum ada irigasi/irigasinya rusak dan meningkatkan pompanisasi
		Peningkatan luas lahan pengembangan tanaman cabai di masing-masing kabupaten.
		Penguatan informasi cuaca untuk peningkatan produksi pertanian.

Melakukan inspeksi pasar, distributor, agen, dan pengecer serta memberikan imbauan kepada distributor agar tidak menahan pasokan/penimbunan.

Tindak Lanjut Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil untuk mengisi persediaan selama masa tanam atau keterlambatan distribusi.

Melaksanakan koordinasi bersama Kabupaten Tana Tidung dan Malinau dalam rangka membahas penyediaan lahan untuk pembangunan gudang Perum BULOG di salah satu wilayah tersebut.

3. Kelancaran Distribusi

Mendorong dilaksanakannya pengerukan dermaga Pelabuhan Malundung, pembangunan dermaga Pelabuhan Malundung, pembangunan pelabuhan di Kabupaten Tana Tidung, dan pembangunan Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Perlunya dilakukan kajian penurunan tarif bongkar muat dan upah buruh pelabuhan.

Mendorong perbaikan dan pembangunan jalan pada titik-titik yang rawan longsor.

Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

4. Komunikasi yang efektif

Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah.

Meningkatkan komunikasi yang efektif untuk mengendalikan ekspektasi masyarakat dan mencegah *panic buying*.